

Lampiran 1

Tabel Checklist Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan SAP

Nama Kabupaten/Kota :

Tahun :

CHECKLIST PENGUNGKAPAN LKPD		Ya	Tidak
1	Penyajian Laporan Keuangan		
A	Struktur Laporan Keuangan		
	a Nama entitas akuntansi/ entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya		
	b Cakupan entitas akuntansi/ entitas pelaporan		
	c Periode yang dicakup		
	d Mata uang pelaporan		
	e Satuan angka yang digunakan		
B	Periode Pelaporan		
	Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan LRA tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut :		
	a Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun		
	b Fakta bahwa jumlah - jumlah komparatif dalam laporan tahunan dan catatan - catatan terkait tidak dapat diperbandingkan		
2	Laporan Realisasi Anggaran		
A	Pendapatan		
	Klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan meliputi :		
	Rincian dan penjelasan PAD, yang terdiri dari :		
	a Pendapatan pajak daerah		
	b Pendapatan retribusi daerah		
	c Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
	d Lain - lain PAD yang sah		
	Rincian dan penjelasan Pendapatan Transfer yang terdiri dari :		
	Dana Perimbangan		
	a Dana Bagi Hasil Pajak		
	b Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		
	c Dana Alokasi Umum		
	d Dana Alokasi Khusus (dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan pemerintah)		
	Pendapatan Transfer Lainnya		
	a Dana Otonomi Khusus		
	b Dana Penyesuaian		

	Rincian dan penjelasan Lain-lain Pendapatan yang Sah, yang terdiri dari :		
a	Pendapatan Hibah		
b	Pendapatan Dana Darurat		
c	Pendapatan Lainnya		
B	Belanja		
a	Entitas akuntansi menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA		
b	Entitas akuntansi menyajikan klasifikasi belanja menurut organisasi		
c	Menyajikan klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam CALK		
C	Pembiayaan		
	Rincian penerimaan pembiayaan		
a	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)		
b	Pencairan dana cadangan		
c	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
d	Penerimaan pinjaman daerah		
e	Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
f	Penerimaan piutang daerah		
	Rincian pengeluaran pembiayaan		
a	Pembentukan dana cadangan		
b	Penanaman modal (investasi) pemerintah daerah		
c	Pembayaran pokok piutang		
d	Pemberian pinjaman daerah		
3	Laporan Arus Kas		
A	Penyajian Laporan Arus Kas		
a	Menjelaskan rincian komponen arus masuk kas dan arus keluar kas dari Aktivitas Operasi		
b	Menjelaskan rincian komponen arus masuk kas dan arus keluar kas dari Aktivitas Investasi		
c	Menjelaskan rincian komponen arus masuk kas dan arus keluar kas dari Aktivitas Pendanaan		
d	Menjelaskan rincian komponen arus masuk kas dan arus keluar kas dari Aktivitas Transitoris		
e	Metode penyajian yang digunakan untuk menyajikan laporan arus kas dan alasannya		
B	Perolehan dan Pelepasan Investasi dalam Perusahaan Daerah dan Unit Operasi Lainnya		
a	Jumlah harga pembelian atau pelepasan		
b	Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas		
c	Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas		

	d	Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas		
4	Catatan Atas Laporan Keuangan			
A	Struktur dan Isi			
	a	Informasi tentang Ekonomi Makro		
	i	Asumsi - asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat pencapaiannya		
	ii	Perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya		
	b	Informasi mengenai Kebijakan fiskal/keuangan		
	i	Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan		
	ii	Perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPR		
	c	Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target		
	i	Mengukur output pada input untuk melihat efisiensi dari suatu program		
	ii	Menguraikan strategi dan sumber daya; gambaran yang jelas dan realisasi baik positif/negatif dengan data historis yang relevan serta mengungkapkan keterbatasan dan kesulitannya		
	d	Informasi Umum mengenai entitas pelaporan		
	i	Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada		
	ii	Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan landasan kegiatan pokoknya		
	iii	Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya		
	iv	Jumlah unit entitas akuntansi yang secara struktural berada dibawahnya		
	e	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan		
	i	Penjelasan asumsi dasar pelaporan keuangan, meliputi : asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas serta asumsi keterukuran dalam satuan uang		
	ii	Basis penyusunan laporan keuangan adalah <i>cash basis toward accrual</i> , sehingga :		
		Basis yang digunakan dalam LRA adalah basis kas		
		Basis yang digunakan dalam Neraca adalah basis akrual		
	f	Rincian dan penjelasan masing - masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan		

	g	Informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan		
	h	Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan		
5	Kebijakan Akuntansi Pendapatan			
	a	Pengakuan		
	i	Pendapatan LO diakui saat : Timbulnya hak atas pendapatan, Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi		
	ii	Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah		
	b	Pengukuran		
		Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)		
	c	Pengungkapan lainnya :		
	i	Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran		
	ii	Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus		
	iii	Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah		
6	Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja			
	a	Pengakuan		
	i	Beban diakui pada saat : timbulnya kewajiban, konsumsi aset, penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa		
	ii	Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah		
	iii	Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.		
	b	Pengukuran		
	i	Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto		
	ii	Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.		
	c	Pengungkapan Lainnya :		
		Hal-hal yang harus diungkapkan berkenaan dengan Beban adalah :		

	i	Pengeluaran beban tahun berkenaan		
		Hal-hal yang harus diungkapkan berkenaan dengan Belanja adalah :		
	i	Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran		
	ii	Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target realisasi belanja daerah		
7	Kebijakan Akuntansi Pembiayaan			
	a	Pengakuan		
		i	Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD	
		ii	Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD	
	b	Pengukuran		
			Pengukuran penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)	
	c	Pengungkapan lainnya :		
		i	Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran	
		ii	Penjelasan landasan hukum berdasarkan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.	
8	Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas			
	a	Pengakuan		
		i	Kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah	
		ii	Kas diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD	
	b	Pengukuran		
			Kas dicatat sebesar nilai nominal. Artinya, disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.	
	c	Pengungkapan Lainnya :		
		i	Rincian Kas dan Setara Kas	
		ii	Kebijakan manajemen setara kas	
9	Kebijakan Akuntansi Piutang			
	a	Pengakuan		
			Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah	
	b	Pengukuran		

		Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.		
	c	Pengungkapan Lainnya :		
	i	Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang.		
	ii	Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur		
	iii	Penjelasan atas penyelesaian piutang		
	iv	Jaminan atau sita jaminan (jika ada)		
10	Kebijakan Akuntansi Persediaan			
	a	Pengakuan		
		Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.		
	b	Pengukuran		
		Persediaan disajikan sebesar : (i) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, (ii) Biaya standar apabila dengan memproduksi sendiri, (iii) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.		
	c	Pengungkapan lainnya :		
	i	Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan		
	ii	Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat		
	iii	Kondisi persediaan		
11	Kebijakan Akuntansi Investasi			
	a	Pengakuan		
		Pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila : (i) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah, (ii) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable)		
	b	Pengukuran		
		Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan		
		Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya kecuali untuk investasi dalam saham berdasarkan tingkat kepemilikannya, yakni: 20% kepemilikan saham menggunakan metode biaya; 20%-50% kepemilikan saham menggunakan metode ekuitas; >50% menggunakan metode ekuitas. Kepemilikan non permanen menggunakan		

		nilai bersih yang direalisasikan		
	c	Pengungkapan investasi :		
	i	Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi		
	ii	Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen		
	iii	Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang		
	iv	Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.		
	v	Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya		
	vi	Perubahan pos investasi		
		Pengungkapan Dana Bergulir :		
	i	Dasar penilaian Dana Bergulir		
	ii	Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya		
	iii	Besarnya suku bunga yang dikenakan		
	iv	Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir		
	v	Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir		
12		Kebijakan Akuntansi Aset Tetap		
	a	Pengakuan		
		Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.		
	b	Pengukuran		
		Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, namun jika tidak memungkinkan dapat didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan		
	c	Pengungkapan lainnya :		
	i	Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (<i>carrying amount</i>)		
	ii	Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :		
		(1) Penambahan		
		(2) Pelepasan		
		(3) Akumulasi penyusutan		
		(4) Mutasi aset tetap lainnya		
	iii	Informasi Penyusutan, meliputi		
		(1) Nilai penyusutan		
		(2) Metode penyusutan yang digunakan		

		(3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan		
	iv	Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode		
13	Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan			
	a	Pengakuan		
		Suatu aset berwujud diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika : (i) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, (ii) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, (iii) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan		
	b	Pengukuran		
		Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan: pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau kontrak konstruksi		
	c	Pengungkapan lainnya :		
	i	Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaiannya dan jangka waktu penyelesaiannya		
	ii	Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya		
	iii	Jumlah biaya yang telah dikeluarkan		
	iv	Uang muka kerja yang diberikan		
	v	Retensi		
14	Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud			
	a	Pengakuan		
		Aset tidak berwujud diakui jika : (i) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan, (ii) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan, (iii) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal		
	b	Pengukuran		
		Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.		
	c	Pengungkapan lainnya :		
	i	Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap aset tak berwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan		
	ii	Keberadaan dan nilai aset tak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi		
	iii	Jumlah komitmen untuk memperoleh aset tak berwujud		
15	Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan			
	a	Pengakuan		

		Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening dana cadangan.		
	b	Pengukuran		
		Dana cadangan diukur sebesar nilai nominal		
	c	Pengungkapan lainnya :		
	i	Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan		
	ii	Tujuan pembentukan dana cadangan		
	iii	Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan		
	iv	Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke Rekening Dana Cadangan		
	v	Sumber dana cadangan		
	vi	Tahun anggaran pelaksanaan dana anggaran		
16	Kebijakan Akuntansi Kewajiban			
	a	Pengakuan		
		Pengakuan Kewajiban : kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal/diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul		
	b	Pengukuran		
		Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.		
	c	Pengungkapan lainnya :		
	i	Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman		
	ii	Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya		
	iii	Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku		
	iv	Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo		
	v	Perjanjian restrukturisasi utang meliputi :		
		(1) Pengurangan pinjaman		
		(2) Modifikasi persyaratan utang		
		(3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman		
		(4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman		
		(5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman		

		(6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan		
	vi	Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur piutang berdasarkan kreditur		
	vii	Biaya pinjaman :		
		(1) Perlakuan biaya pinjaman		
		(2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan		
		(3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan		
17	Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan			
	a	Koreksi Kesalahan		
		Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada CALK		
	b	Perubahan Kebijakan Akuntansi		
		Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CALK		
	c	Perubahan Estimasi Akuntansi		
		Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.		
	d	Operasi yang Tidak Dilanjutkan		
		Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan - misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, dampak sosial atau dampak pelayanan harus diungkapkan pada CALK.		
18	Kebijakan Laporan Keuangan Konsolidasian			
	Dalam CALK perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing			
JUMLAH				
Tingkat Pengungkapan				

Lampiran 2 : Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

NO	PEMERINTAH KAB/KOTA	2015	2016	2017	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kab. Banjarnegara	90	88	89	54.88%	53.66%	54.27%
2	Kab. Banyumas	91	91	89	55.49%	55.49%	54.27%
3	Kab. Batang	103	105	102	62.80%	64.02%	62.20%
4	Kab. Blora	74	78	82	45.12%	47.56%	50.00%
5	Kab. Boyolali	86	95	88	52.44%	57.93%	53.66%
6	Kab. Brebes	100	100	100	60.98%	60.98%	60.98%
7	Kab. Cilacap	91	91	99	55.49%	55.49%	60.37%
8	Kab. Demak	101	102	103	61.59%	62.20%	62.80%
9	Kab. Grobogan	104	104	104	63.41%	63.41%	63.41%
10	Kab. Jepara	96	96	97	58.54%	58.54%	59.15%
11	Kab. Karanganyar	100	101	101	60.98%	61.59%	61.59%
12	Kab. Kebumen	102	102	102	62.20%	62.20%	62.20%
13	Kab. Kendal	105	105	105	64.02%	64.02%	64.02%
14	Kab. Klaten	99	100	98	60.37%	60.98%	59.76%
15	Kab. Kudus	94	96	95	57.32%	58.54%	57.93%
16	Kab. Magelang	88	88	87	53.66%	53.66%	53.05%
17	Kab. Pati	105	105	105	64.02%	64.02%	64.02%
18	Kab. Pekalongan	100	101	100	60.98%	61.59%	60.98%
19	Kab. Pemasang	114	114	114	69.51%	69.51%	69.51%
20	Kab. Purbalingga	97	99	101	59.15%	60.37%	61.59%
21	Kab. Purworejo	107	107	107	65.24%	65.24%	65.24%
22	Kab. Rembang	102	100	101	62.20%	60.98%	61.59%
23	Kab. Semarang	107	108	108	65.24%	65.85%	65.85%
24	Kab. Sragen	95	96	96	57.93%	58.54%	58.54%
25	Kab. Sukoharjo	87	90	88	53.05%	54.88%	53.66%
26	Kab. Tegal	99	92	92	60.37%	56.10%	56.10%
27	Kab. Temanggung	112	112	113	68.29%	68.29%	68.90%
28	Kab. Wonogiri	100	101	102	60.98%	61.59%	62.20%
29	Kab. Wonosobo	105	105	104	64.02%	64.02%	63.41%
30	Kota Magelang	104	103	102	63.41%	62.80%	62.20%
31	Kota Pekalongan	105	106	107	64.02%	64.63%	65.24%
32	Kota Salatiga	94	95	95	57.32%	57.93%	57.93%
33	Kota Semarang	110	112	112	67.07%	68.29%	68.29%
34	Kota Surakarta	96	97	97	58.54%	59.15%	59.15%
35	Kota Tegal	100	101	102	60.98%	61.59%	62.20%

Lampiran 3 : Tingkat Ketergantungan

No	KAB/KOTA	DAU			TOTAL PENDAPATAN			TK		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kab. Banjarnegara	862,810,552,000.00	976,642,965,000.00	959,486,489,000.00	1,693,503,657,927.00	1,836,015,079,137.00	2,167,801,161,490.00	51%	53%	44%
2	Kab. Banyumas	1,277,833,796,000.00	1,398,539,653,000.00	1,373,971,809,000.00	2,654,284,992,375.00	2,852,968,390,191.00	3,221,258,052,894.00	48%	49%	43%
3	Kab. Batang	706,782,246,000.00	790,848,003,000.00	779,010,049,000.00	1,396,266,245,120.81	1,498,614,094,093.00	1,566,154,720,813.58	51%	53%	50%
4	Kab. Blora	848,823,612,000.00	943,325,498,000.00	926,754,302,000.00	1,648,791,900,900.00	1,858,187,916,237.00	2,013,829,444,230.00	51%	51%	46%
5	Kab. Boyolali	968,089,632,000.00	1,032,744,010,000.00	1,014,602,019,000.00	1,937,150,203,967.00	1,993,495,112,162.00	2,176,496,270,254.00	50%	52%	47%
6	Kab. Brebes	1,234,338,079,000.00	1,339,381,605,000.00	1,317,061,804,000.00	2,416,351,960,920.00	2,572,334,594,629.30	2,856,934,060,543.79	51%	52%	46%
7	Kab. Cilacap	1,332,536,848,000.00	1,384,695,514,000.00	1,360,370,867,000.00	2,737,224,737,990.17	2,796,010,344,654.42	3,067,274,791,139.69	49%	50%	44%
8	Kab. Demak	833,041,455,000.00	908,643,744,000.00	892,681,795,000.00	1,786,987,656,752.00	1,952,459,922,200.00	2,060,864,280,423.00	47%	47%	43%
9	Kab. Grobogan	1,008,901,500,000.00	1,110,337,027,000.00	1,091,590,533,000.00	2,017,588,934,756.00	2,203,275,381,321.00	2,426,674,663,998.00	50%	50%	45%
10	Kab. Jepara	935,771,120,000.00	1,000,373,359,000.00	982,800,016,000.00	1,930,958,695,918.00	2,106,087,671,994.00	2,165,074,563,873.00	48%	47%	45%
11	Kab. Karanganyar	906,446,527,000.00	996,164,049,000.00	978,664,650,000.00	1,834,209,380,841.00	2,012,335,065,180.00	2,043,460,305,969.00	49%	50%	48%
12	Kab. Kebumen	1,146,008,708,000.00	1,256,068,249,000.00	1,234,003,169,000.00	2,326,188,256,641.00	2,606,209,824,034.00	2,713,113,397,677.00	49%	48%	45%
13	Kab. Kendal	884,901,572,000.00	972,952,576,000.00	955,860,928,000.00	1,720,521,350,832.00	1,888,728,093,841.26	2,047,555,046,096.00	51%	52%	47%
14	Kab. Klaten	1,164,196,398,000.00	1,204,344,586,098.00	1,271,590,067,902.00	2,177,820,724,857.45	2,258,604,630,605.19	2,581,515,295,917.04	53%	53%	49%
15	Kab. Kudus	784,919,177,000.00	822,153,771,000.00	807,711,173,000.00	1,755,769,420,300.86	1,880,999,970,784.00	1,983,213,078,247.00	45%	44%	41%
16	Kab. Magelang	996,070,014,000.00	1,078,981,977,000.00	1,060,027,733,000.00	1,945,955,251,171.00	2,036,310,089,428.00	2,271,336,015,858.00	51%	53%	47%
17	Kab. Pati	1,086,645,667,000.00	1,207,508,997,000.00	1,186,296,947,000.00	2,181,691,961,101.00	2,445,063,689,933.00	2,769,242,943,472.00	50%	49%	43%
18	Kab. Pekalongan	862,011,706,000.00	926,571,243,000.00	901,294,366,000.00	1,697,594,551,514.84	1,787,351,674,572.98	2,067,907,851,793.77	51%	52%	44%
19	Kab. Pemasang	1,058,982,530,000.00	1,197,916,501,000.00	1,176,872,960,000.00	1,966,423,490,803.00	2,112,514,280,374.00	2,353,030,274,957.00	54%	57%	50%
20	Kab. Purbalingga	805,222,229,000.00	897,337,823,000.00	881,574,483,000.00	1,567,587,735,546.00	1,746,235,699,687.00	1,957,994,897,247.00	51%	51%	45%
21	Kab. Purworejo	875,528,049,000.00	940,778,244,000.00	924,251,795,000.00	1,842,491,063,926.00	2,069,000,842,574.00	2,114,807,792,154.00	48%	45%	44%
22	Kab. Rembang	723,091,447,000.00	785,380,985,000.00	771,584,367,000.00	1,408,950,534,485.80	1,564,868,839,955.55	1,722,252,909,030.04	51%	50%	45%
23	Kab. Semarang	876,672,925,000.00	968,848,031,000.00	951,828,487,000.00	1,677,158,224,329.00	1,978,138,017,128.00	2,135,227,865,430.80	52%	49%	45%
24	Kab. Sragen	977,443,589,000.00	1,067,774,278,000.00	1,049,016,918,000.00	2,024,057,424,890.00	2,092,759,142,908.00	2,187,032,686,896.00	48%	51%	48%
25	Kab. Sukoharjo	854,457,636,000.00	922,624,169,000.00	906,416,629,000.00	1,784,106,364,462.00	1,931,896,575,824.00	2,055,571,033,667.00	48%	48%	44%
26	Kab. Tegal	1,085,549,293,000.00	1,162,102,111,000.00	1,141,687,714,000.00	2,097,095,623,983.00	2,161,161,059,587.60	2,450,766,552,130.20	52%	54%	47%
27	Kab. Temanggung	731,733,741,000.00	807,995,010,000.00	793,801,136,000.00	1,469,482,958,105.00	1,678,688,079,170.00	1,779,850,394,321.00	50%	48%	45%
28	Kab. Wonogiri	1,031,393,472,000.00	1,145,434,277,000.00	1,125,312,680,000.00	1,963,704,538,729.00	2,035,056,535,365.00	2,317,978,656,682.91	53%	56%	49%
29	Kab. Wonosobo	748,447,761,000.00	841,407,175,000.00	826,626,357,000.00	1,432,159,651,029.00	1,575,601,833,680.00	1,829,290,334,360.00	52%	53%	45%
30	Kota Magelang	418,257,922,000.00	447,909,575,000.00	440,041,244,000.00	781,335,799,509.00	840,042,626,525.00	909,525,862,920.00	54%	53%	48%
31	Kota Pekalongan	421,276,527,000.00	457,085,256,000.00	449,055,738,000.00	809,733,612,473.00	857,642,985,779.00	915,920,377,495.00	52%	53%	49%
32	Kota Salatiga	400,176,755,000.00	456,079,561,000.00	448,067,710,000.00	750,581,558,962.00	879,784,189,262.00	882,746,082,111.00	53%	52%	51%
33	Kota Semarang	1,126,847,634,000.00	1,211,708,204,000.00	1,190,422,387,000.00	3,347,160,206,438.00	4,103,151,795,483.00	3,964,574,307,584.00	34%	30%	30%
34	Kota Surakarta	713,300,856,000.00	841,536,122,000.00	826,753,038,000.00	1,568,482,686,616.07	1,703,003,847,995.00	1,803,920,801,907.91	45%	49%	46%
35	Kota Tegal	405,831,088,000.00	490,772,001,000.00	482,150,715,000.00	947,468,621,453.00	1,051,121,466,005.00	1,024,765,938,276.99	43%	47%	47%

Lampiran 4 : Pendapatan Asli Daerah

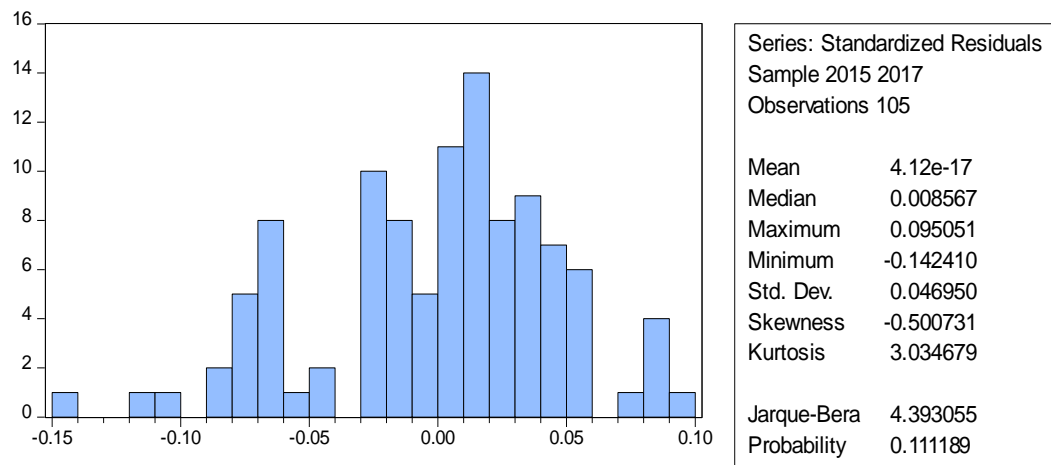
NO	PEMERINTAH KAB/KOTA	2015	2016	2017
1	2	3	4	5
1	Kab. Banjarnegara	180,561,068,549.00	221,048,387,512.00	297,485,382,003.00
2	Kab. Banyumas	502,281,349,460.00	541,418,386,912.00	619,701,627,380.00
3	Kab. Batang	179,721,273,967.81	209,957,559,449.00	219,807,128,306.58
4	Kab. Blora	156,402,924,037.00	171,277,522,706.00	280,042,019,102.00
5	Kab. Boyolali	260,633,637,928.00	292,310,032,226.00	388,014,897,386.00
6	Kab. Brebes	301,095,435,022.00	339,156,063,168.30	523,660,773,731.79
7	Kab. Cilacap	409,845,660,919.17	428,598,349,897.42	648,091,381,095.69
8	Kab. Demak	254,324,487,512.00	287,457,500,571.00	309,612,407,201.00
9	Kab. Grobogan	272,718,439,175.00	299,211,316,168.00	440,456,238,668.00
10	Kab. Jepara	270,251,582,727.00	322,509,753,285.00	325,530,346,533.00
11	Kab. Karanganyar	255,445,549,750.00	301,307,800,956.00	415,142,563,370.00
12	Kab. Kebumen	245,159,255,421.00	291,016,321,703.00	443,608,862,461.00
13	Kab. Kendal	239,564,403,981.00	265,074,406,548.26	404,978,613,972.00
14	Kab. Klaten	190,622,670,128.45	224,197,408,481.19	371,718,439,306.04
15	Kab. Kudus	255,284,092,547.86	279,239,106,717.00	366,031,203,778.00
16	Kab. Magelang	261,569,091,783.00	288,485,678,128.00	403,561,238,310.00
17	Kab. Pati	310,063,640,827.00	314,921,084,791.00	449,821,345,800.00
18	Kab. Pekalongan	251,558,970,833.00	310,572,581,551.98	305,394,299,060.00
19	Kab. Pemasang	230,435,212,865.00	275,458,054,016.00	425,893,266,850.00
20	Kab. Purbalingga	215,622,047,787.00	251,816,668,602.00	355,859,003,583.00
21	Kab. Purworejo	233,934,134,286.00	255,599,240,424.00	298,606,494,653.00
22	Kab. Rembang	300,319,284,807.04	234,168,365,750.55	300,319,284,807.04
23	Kab. Semarang	278,851,900,617.00	318,536,051,176.00	417,417,848,830.80
24	Kab. Sragen	267,711,820,479.00	297,176,332,577.00	404,569,404,722.00
25	Kab. Sukoharjo	313,947,492,011.00	363,163,428,162.00	464,567,409,857.00
26	Kab. Tegal	304,000,970,135.00	316,051,189,733.60	375,531,165,351.20
27	Kab. Temanggung	212,498,139,929.00	281,328,148,970.00	308,466,748,340.00
28	Kab. Wonogiri	211,208,601,200.00	218,604,854,595.00	333,840,434,904.91
29	Kab. Wonosobo	182,607,628,797.00	199,894,767,510.00	228,017,473,938.00
30	Kota Magelang	186,677,410,081.00	220,315,848,702.00	233,557,714,356.00
31	Kota Pekalongan	152,044,596,332.00	178,604,460,870.00	192,002,871,181.00
32	Kota Salatiga	167,010,555,173.00	203,768,652,017.00	220,243,361,132.00
33	Kota Semarang	1,201,581,778,459.00	1,491,645,900,065.00	1,791,886,378,674.00
34	Kota Surakarta	372,798,426,790.07	425,502,779,064.00	527,544,224,970.91
35	Kota Tegal	271,601,407,419.00	287,343,889,954.00	306,830,656,134.99

Lampiran 5 : Hasil *Output EViews 10*

Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2
Mean	0.606000	0.483905	26.43924
Median	0.610000	0.490000	26.40000
Maximum	0.700000	0.570000	28.21000
Minimum	0.450000	0.300000	25.75000
Std. Dev.	0.046957	0.043929	0.407300
Skewness	-0.526407	-1.614481	1.657743
Kurtosis	3.545990	7.829697	7.839676
Jarque-Bera Probability	6.153536 0.046108	147.6658 0.000000	150.5653 0.000000
Sum	63.63000	50.81000	2776.120
Sum Sq. Dev.	0.229320	0.200699	17.25294
Observations	105	105	105

Hasil Uji Normalitas



Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2
X1	1	-0.7566493025442951
X2	-0.7566493025442951	1

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: LOGRESID2

Method: Panel Least Squares

Date: 03/19/19 Time: 16:59

Sample: 2015 2017

Periods included: 3

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-1.714893	2.800759	-0.612296	0.5417
X2	0.024327	0.302076	0.080532	0.9360
C	-2.973074	9.055970	-0.328300	0.7434
R-squared	0.010350	Mean dependent var		-3.159738
Adjusted R-squared	-0.009055	S.D. dependent var		0.816676
S.E. of regression	0.820365	Akaike info criterion		2.470021
Sum squared resid	68.64588	Schwarz criterion		2.545848
Log likelihood	-126.6761	Hannan-Quinn criter.		2.500747
F-statistic	0.533369	Durbin-Watson stat		0.341719
Prob(F-statistic)	0.588252			

Hasil Uji Autokorelasi

Weighted Statistics			
R-squared	0.084551	Mean dependent var	0.075292
Adjusted R-squared	0.066601	S.D. dependent var	0.010537
S.E. of regression	0.010180	Sum squared resid	0.010571
F-statistic	4.710338	Durbin-Watson stat	1.883268
Prob(F-statistic)	0.011050		

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	61.363222	(34,68)	0.0000
Cross-section Chi-square	362.852324	34	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 03/19/19 Time: 17:02

Sample: 2015 2017

Periods included: 3

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.075612	0.160775	-0.470300	0.6391
X2	0.006168	0.017340	0.355711	0.7228
C	0.479508	0.519848	0.922399	0.3585
R-squared	0.013593	Mean dependent var		0.606000
Adjusted R-squared	-0.005748	S.D. dependent var		0.046957
S.E. of regression	0.047092	Akaike info criterion		-3.245264
Sum squared resid	0.226203	Schwarz criterion		-3.169436
Log likelihood	173.3763	Hannan-Quinn criter.		-3.214537
F-statistic	0.702805	Durbin-Watson stat		0.101070
Prob(F-statistic)	0.497576			

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.681289	2	0.7113

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	0.114314	0.104458	0.000143	0.4102
X2	0.026093	0.024749	0.000005	0.5474

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 03/19/19 Time: 17:02

Sample: 2015 2017

Periods included: 3

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.139183	0.251745	-0.552874	0.5822
X1	0.114314	0.062703	1.823104	0.0727
X2	0.026093	0.008644	3.018417	0.0036

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.968865	Mean dependent var	0.606000
Adjusted R-squared	0.952382	S.D. dependent var	0.046957
S.E. of regression	0.010247	Akaike info criterion	-6.053381
Sum squared resid	0.007140	Schwarz criterion	-5.118176
Log likelihood	354.8025	Hannan-Quinn criter.	-5.674418
F-statistic	58.77882	Durbin-Watson stat	2.787631
Prob(F-statistic)	0.000000		

Hasil Regresi dengan *Random Effect*

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 03/19/19 Time: 17:03
 Sample: 2015 2017
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 105
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.104458	0.061550	1.697125	0.0927
X2	0.024749	0.008351	2.963552	0.0038
C	-0.098905	0.243709	-0.405832	0.6857

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.047247	0.9551
Idiosyncratic random		0.010247	0.0449

Weighted Statistics			
R-squared	0.084551	Mean dependent var	0.075292
Adjusted R-squared	0.066601	S.D. dependent var	0.010537
S.E. of regression	0.010180	Sum squared resid	0.010571
F-statistic	4.710338	Durbin-Watson stat	1.883268
Prob(F-statistic)	0.011050		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.000326	Mean dependent var	0.606000
Sum squared resid	0.229245	Durbin-Watson stat	0.086845